

PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN RASIO DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010-2019

Tia Weldison¹⁾, Dahlan Tampubolon²⁾, Ritayani Iyan²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : tiaweldison28@gmail.com

The Effect Of Non Cash Transactions, Regional Original Income (PAD) And Fiscal Decentralization Ratio On Regional Shopping Efficiency Riau Province 2010-2019

ABSTRACT

This study analyzes the influence of non-cash transactions, regional own revenue, and the ratio of fiscal decentralization on the efficiency of regional expenditure. The research was conducted in Riau Province using secondary data such as regional expenditure, non-cash transactions, and regional own revenues of Riau Province in 2010-2019. Multiple regression analysis is used to examine the influence of non-cash transactions, fiscal decentralization ratios, and local revenue on the efficiency of regional spending. The study results show that non-cash transactions and regional own revenue have a significant and negative effect on the efficiency of regional expenditure in Riau Province. Fiscal decentralization has had a significant and positive influence on the efficiency of regional expenditure in Riau Province in 2010-2019. The non-cash transaction variable is the variable that most influences the efficiency of regional expenditure.

Keywords : Non-cash transaction, fiscal decentralization, efficiency, expenditure

PENDAHULUAN

Desentralisasi berdampak bagi daerah untuk transparan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan bertujuan mengetahui tingkat pengelolaan keuangan dan kemampuan daerah dalam memberdayakan asset (Jumingan, 2011). Telaah alokasi belanja akan mendorong naiknya keyakinan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui review belanja daerah. Daya ungkit ekonomi daerah akan muncul jika belanja modal lebih dibesarkan karena penting bagi pembangunan daerah (Kuncoro, 2012).

Analisis terhadap entitas belanja daerah merupakan hal yang cukup penting untuk dilaksanakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam memanfaatkan APBD agar efektif, efisien dan ekonomis. Mahmudi (2015) berpendapat telaah belanja daerah digunakan untuk memberikan gambaran terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi anggaran, dan melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan sasarannya.

Ada gejala umum pemerintah kabupaten dan kota, termasuk di Riau, memiliki ketergantungan yang tinggi atas transfer dari APBN. Sekitar 90% daerah memiliki

komposisi APBDnya lebih dari separoh berasal dari dana transfer. Keadaan tersebut menyebabkan tekanan bagi pemerintah daerah. Ditambah lagi lemahnya kemampuan daerah meningkatkan PAD nya.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020 hingga jelang akhir Oktober ini masih tergolong rendah. Untuk realisasi APBD pada sektor keuangan baru mencapai 49,16 persen, sedangkan realisasi fisik juga belum terlalu menggembirakan yakni baru mencapai 54,57 persen. Derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah digunakan mengukur kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan dilihat dari kemampuan memenuhi belanja daerah yang bersumber daripenerimaan daerah itu sendiri (BPS Provinsi Riau, 2020).

Implementasi transaksi non tunai sudah dikaji pemanfaatannya oleh Septiani & Kusumastuti (2019) dalam belanja pemerintah di wilayah lain. Pelaksanaan transaksi non tunai secara teknis melalui pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak tertentu ke pihak lainnya menggunakan instrumen alat pembayaran media kartu (APMK, cek, bilyet giro, dan sebagainya). Dalam konteks pemerintah, maka pembayaran yang dijelaskan pada aktifitas yang berkaitan dengan belanja daerah. Dalam melaksanakan penerapan transaksi non tunai pada aktifitas keuangan daerah, dilaksanakan dengan dasar regulasi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah melalui instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Kedua aturan tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menggunakan transaksi non tunai dalam aktifitas keuangan daerahnya. Melalui aturan-aturan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan transaksi non tunai bertujuan untuk memberikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, dan transparan (Pelealu et al., 2018).

Di Riau belum ada kajian seperti ini, dan dikombinasikan dengan variabel PAD serta desentralisasi fiskal. Kajian ini untuk menganalisis pengaruh transaksi non tunai, PAD dan rasio desentralisasi fiskal terhadap efisiensi belanja daerah Provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Halim (2014) menyatakan belanja daerah merupakan salah satu jenis komponen anggaran yang memiliki sifat pada pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 menyebutkan belanja merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Erlina (2015) di dalam APBD, belanja daerah meliputi belanja prioritas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Mahmudi (2015) menyebutkan perbandingan capaian realisasi belanja dari total anggaran menjadi ukuran efisiensi belanja. Efisiensi merupakan keadaan tuntasnya pelaksanaan pekerjaan secara benar dan dengan kemampuan yang dimiliki sepenuhnya. Indikasi membaiknya kinerja terlihat dengan semakin tingginya porsi belanja langsung dalam belanja. Lebih murah dan lebih cepat suatu kegiatan karena membaiknya proses, merupakan bagian dari efisiensi.

Sistem pembayaran mencakup beberapa instrumen penting di antaranya seperti alat pembayaran dan mekanisme kliring hingga pelaksanaan akhir (settlement) (Bank Indonesia, 2011). Sistem pembayaran senantiasa mengikuti perkembangan serta kemajuan teknologi negara lain. Seperangkat komponen sistem pembayaran yang secara umum berbentuk kartu antara lain: kartu ATM, kartu kredit, kartu debit. Jenis kartu lain yang fungsinya sebagai media bayar seperti kartu pint smart, dompet elektronik, dan alat bayar lain yang disamakan dengan kartu. Tujuan pemanfaatan kartu-kartu tersebut supaya masyarakat mampu dan siap untuk mengikuti teknologi canggih.

Transaksi keuangan terus mengalami kemajuan mengikuti teknologi yang cepat pada pola dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran erat kaitannya dengan transaksi kegiatan ekonomi sehari-hari dari pelaku ekonomi (Sayoga & Tan, 2017). Komponen utama sistem pembayaran (Subari & Ascarya., 2013) yaitu: kelembagaan, instrumen, kerangka hukum dan kerangka kebijakan. Sistem

pembayaran non tunai adalah instrumen berbasis warkat sudah lama biasa dimanfaatkan perbankan. Pembayaran non tunai juga dilakukan lembaga keuangan melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan sistem kliring.

Belakangan ini banyak negara mengenalkan electronic money (e-money) atau digital money. E-money menjadi alat pembayaran multi fungsi (multi purposed). Transaksi ini melibatkan pemanfaatan jaringan komputer dan internet (Abdullah & Tantri, 2012). Ciri e-money agak berbeda, tidak perlu otorisasi, tanpa biaya dan jumlah uangnya terekam di kartu (Bank Indonesia, 2011).

Literasi keuangan inklusi menjadi gambaran pemanfaatan non-tunai ke depan. Untuk mengefektifkan sistem pembayaran, Bank Indonesia mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju *cash-less society*. Kebiasaan memegang uang tunai bagi masyarakat Indonesia saat ini menjadi kendala pengembangan *cash-less society*.

Pendapatan asli daerah atau yang biasa dikenal dengan sebutan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber di daerah yang terdapat pada wilayahnya sendiri yang dikutip berdasarkan regulasi yang berbetuk peraturan daerah atau perundang-undangan diterapkan pada daerah tersebut. Instrumen penerimaan atau pendapatan daerah ini memiliki peran yang penting dan strategis, karena berdasarkan sektor ini akan diketahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki daerah untuk membiayai aktifitas pemerintah dan mewujudkan rencana pembangunan

jangka pendek maupun jangka panjang (Khusaini, 2016).

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Pendapatan asli daerah menurut Mardiasmo (2009) merupakan “penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PAD menurut Adi (2013) adalah “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke level pemerintahan yang ada di bawahnya. Tiga jenis desentralisasi, yaitu

politik, administratif, dan fiskal (Khusaini, 2016). Menurut Dunn (2013) desentralisasi fiskal adalah “suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan”.

Desentralisasi fiskal bergantung independensi pengambilan keputusan. Ada tiga tipe desentralisasi fiskal, yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Dekonsentrasi bermakna unit administrasi lokal sebagai cabang pemerintah pusat. Delegasi berarti dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu, pemerintah daerah adalah agen pemerintah pusat. Devolusi mengacu untuk memutuskan apa yang dilakukan ada pada pemerintah daerah, kewenangan maupun pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Riau dengan pengambilan data menggunakan data belanja daerah, pendapatan asli daerah, transaksi non-tunai serta penerimaan daerah. Penelitian dilakukan pada tahun 2020 dan rentang data yang diteliti dari tahun 2010-2019

Data sekunder menjadi data utama dalam penelitian ini, berupa deret waktu (time series) yaitu data yang telah tersusun secara teratur yang berupa laporan yang didapat langsung dari institusi atau instansi seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Selain itu penulis juga memperoleh data dari jurnal ilmiah yang terdapat pada penelitian

terdahulu, literatur pustaka tentang teori variabel penelitian, dan website resmi Pemerintah Daerah Provinsi Riau seperti <http://e-keuangan.riau.go.id/>.

Penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel prediktor (Trianto, 2015:8). Variabel prediktornya ini adalah transaksi non tunai, rasio desentralisasi fiskal dan pendapatan asli daerah. Variabel terikatnya adalah efisiensi belanja daerah Provinsi Riau tahun 2010-2019. Analisis deskriptif untuk menjelaskan dari data yang dihasilkan perhitungan dan disajikan dalam tabel frekuensi, rata-rata, Minimum dan Maximum sebagai langkah dalam menentukan kesimpulan penelitian (Azwar, 2015).

Analisis deskriptif juga memiliki makna menyajikan data sebenarnya dalam rangka untuk mengetahui kondisi dari data tersebut. Metode analisis data pada kajian ini regresi linier berganda, untuk menghasilkan koefisien prediktor terhadap variabel terikatnya (Sugiyono, 2018:65). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh transaksi non tunai, rasio desentralisasi fiskal dan pendapatan asli daerah terhadap efisiensi belanja daerah Provinsi Riau tahun 2010-2019.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Efisiensi belanja daerah Provinsi Riau tahun ke-t (Persentase)

a = Konstanta

X_1 = Transaksi non tunai tahun ke-t (Triliun Rupiah)

X_2 = Pendapatan Asli Daerah tahun ke-t (Triliun Rupiah)

X_3 = Rasio desentralisasi fiskal tahun ke-t (Persentase)

e = Tingkat Kesalahan (error)

HASIL PENELITIAN

Analisis deskriptif menyajikan data untuk pembuatan kesimpulan umum (Azwar, 2015:25). Tabel 1 menggambarkan perkembangan transaksi non tunai, pendapatan asli daerah, desentralisasi fiskal dan efisiensi belanja daerah di Riau tahun 2010 – 2019.

Tabel 1 Transaksi Non Tunai, Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Belanja Daerah di Riau tahun 2010 – 2019.

Tahun	Transaksi Non Tunai (Triliun)	Pendapatan Asli Daerah	Desentralisasi Fiskal (%)	Efisiensi (%)
2010	4,7	1.700.	39,53	88,84
2011	5,2	2.210.	40,63	88,91
2012	5,9	2.588.	37,80	79,66
2013	6,1	2.725	38,96	89,24
2014	8,4	3.245	39,90	67,75
2015	7,3	3.476	50,30	72,05
2016	6,6	3.110	44,80	79,58
2017	5,0	3.360	42,52	87,85
2018	4,8	3.638	42,91	81,90
2019	4,0	3.558	40,88	92,24

Sumber: Bank Indonesia, Pekanbaru (2021); Dispenda Provinsi Riau (2021); BPKAD Provinsi Riau (2021)

Analisis kenormalan data adalah pengujian melihat apakah residual yang mempunyai sebaran normal. Dapat diketahui nilai uji normalitas yang terdapat pada bagi Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,154. Data ini memiliki makna $0,154 > 0,05$, disimpulkan distribusi residual berdistribusi normal. Sehingga dapat dilanjutkan penggunaan modelnya. Persamaan regresi linier berganda yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel prediktornya. Melalui perhitungan, diperoleh nilai VIF ketiga model

prediktor yang dimasukkan ke dalam persamaan memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan dengan toleransi < 1,0. Kesimpulannya, antar variabel prediktor tidak berkolinieritas.

Di dalam model persamaan regresi linier, varian residual satu dengan lainnya harus seragam atau homoskedastisitas. Melalui uji korelasi peringkat Spearman diperoleh hasil signifikansi ketiga variabel prediktor lebih besar dari 0,05, artinya residualnya homoskedastisitas. Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dapat dijadikan model estimasi yang baik. Statistik Durbin Watson (DW) adalah 3,023, berarti residual dari persamaan yang dihasilkan tidak memiliki gejala autokorelasi. Sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan dalam persamaan regresi.

Pengaruh transaksi non tunai, PAD, dan desentralisasi fiskal terhadap efisiensi belanja daerah dapat digambarkan dalam suatu bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 139,665 - 7,054X_1 - 0,990X_2 + 0,420X_3$$

Signifikansi t-statistik pada transaksi non tunai adalah 0,017 (< 0,05). Transaksi non tunai berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah. Signifikansi t-statistik pada pendapatan asli daerah adalah 0,007 (< 0,05). pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah. Signifikansi t-statistik pada desentralisasi fiskal adalah 0,041 (<0,05). desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.

Transaksi non tunai (x1) menunjukkan angka -7,054. sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perubahan pada transaksi non tunai meningkat maka akan mempengaruhi penurunan nilai efisiensi belanja daerah sebesar 7,504 persen.

Pendapatan asli daerah (x2) menunjukkan angka -0.990 sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat peningkatan pendapatan asli daerah, maka akan mempengaruhi penurunan pada efisiensi belanja daerah sebesar 0,990 persen.

Desentralisasi fiskal (x3) menunjukkan angka 0,420. sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perubahan peningkatan desentralisasi fiskal maka akan mempengaruhi peningkatan pada efisiensi belanja daerah sebesar 0.420 persen

Signifikansi F-statistik pada model 0.008 (< 0.05). Transaksi non tunai (x1), pendapatan asli daerah (x2), desentralisasi fiskal (x3) secara serentak memberikan pengaruh efisiensi belanja daerah. Variasi efisiensi belanja daerah dipengaruhi 84,5% oleh variasi transaksi non tunai, pendapatan asli daerah, dan desentralisasi fiskal. Sekitar 15,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan ke dalam model persamaan. Berdasarkan nilai koefisien Beta, dapat diketahui bahwa variabel transaksi non tunai dengan nilai - 1.166 adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.

Transaksi Non Tunai di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling rendah adalah 4 Triliun yang terjadi pada tahun 2019. Sedangkan nilai Transaksi Non Tunai

di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah 8,4 Triliun yang terjadi pada tahun 2014. Adapun nilai rata-rata efisiensi belanja daerah sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 5,8 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Riau memiliki transaksi non tunai yang berada pada rentang rata-rata 5,8 Triliun.

Pendapatan asli daerah di Provinsi Riau hanya Rp. 1,7 Triliun yang terjadi pada tahun 2010, naik menjadi Rp. 3,6 Triliun tahun 2018 dan turun kembali pada 2019 Rp. 2,95 Triliun.

Desentralisasi fiskal di Provinsi Riau 23,92% pada tahun 2014 dan menjadi 42,28 % pada tahun 2018. Perkembangan ini menunjukkan setiap tahunnya nilai desentralisasi fiskal Provinsi Riau senantiasa mengalami peningkatan. Selain nilai desentralisasi fiskal, pada tahun 2018 juga nilai tertinggi dari pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan tahun 2018 adalah tahun dimana Provinsi Riau memiliki pencapaian keuangan yang baik. Adapun nilai rata-rata desentralisasi fiskal sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 31,05%.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling rendah adalah 67,75% yang terjadi pada tahun 2015. Sedangkan efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah 92,24% yang terjadi pada tahun 2019. Adapun nilai rata-rata efisiensi belanja daerah sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 82,8020. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Riau memiliki nilai efisiensi belanja daerah yang cukup baik dan ideal.

Hal ini dibuktikan nilai efisiensi belanja daerah relatif moderat, yang tidak terlampaui tinggi dan juga tidak rendah.

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang sewajarnya dan dianggap paling menonjol yang disusun secara sistematis, informatif dan kritis serta ditulis dalam bentuk bahasa yang baku (baik dan benar). Hasil pengolahan data yang disajikan harus selektif dan mampu menggunakan fasilitas penjabar secara informatif dan kritis sehingga tidak memberikan informasi yang berulang. Pembahasan hasil merupakan analisis atau argumentasi kritis mengenai relevansi hasil penelitian dengan teori dan fakta empiris. Dalam hal ini, penulis perlu menunjukkan secara rinci alasan mengapa kondisi seperti pada hasil penelitian tersebut bisa terjadi (baik secara teoritis maupun secara empiris). Selain itu, penulis juga perlu menunjukkan manfaat serta kemungkinan pengembangan yang lebih bermakna ilmiah dan universal. Jika dalam bagian hasil dan pembahasan terdapat sub bagian-bagian tertentu, cukup dibedakan dengan penomoran.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan dari pengolahan data secara statistik menggunakan aplikasi SPSS 23 menyatakan bahwa persamaan regresi telah diuji asumsi klasik dan memberikan hasil sebagai persamaan yang baik dan dapat digunakan dalam perhitungan persamaan regresi berganda. Hasil persamaan di atas bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh dari

masing-masing variabel x terhadap variabel y pada penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini dibahas dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Pembahasan terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Riau tahun 2010-2019.

Berdasarkan analisis deskriptif dapat diketahui bahwa nilai Transaksi Non Tunai di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling rendah adalah 4 Triliun yang terjadi pada tahun 2019. Sedangkan nilai Transaksi Non Tunai di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah 8,4 Triliun yang terjadi pada tahun 2014. Adapun nilai rata-rata efisiensi belanja daerah sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 5,8 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Riau memiliki transaksi non tunai yang berada pada rentang rata-rata 5,8 Triliun. Sedangkan nilai Standar Deviasi yang didapatkan adalah 1,3 yang menyatakan nilainya lebih rendah dari rata-rata. Maka hal ini membuktikan bahwa nilai transaksi non tunai dari setiap tahunnya tidak memiliki selisih yang jauh satu sama lainnya.

Hasil analisis regresi pada Nilai Transaksi Non Tunai (X1) menunjukkan angka -7,054. sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perubahan pada Transaksi Non Tunai meningkat maka akan mempengaruhi penurunan nilai Efisiensi Belanja Daerah sebesar 3,226 satuan. Pada uji hipotesis menyatakan Nilai signifikan t pada Transaksi Non Tunai adalah 0,017.

Maka nilai perbandingan t hitung dan t tabel adalah $0,017 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hasil uji parsial pada Transaksi Non Tunai mendapatkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Efisiensi Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Riau 2010-2019

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling rendah adalah 1,7 Triliun yang terjadi pada tahun 2010. Sedangkan nilai Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah 3,6 Triliun yang terjadi pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa dari tahun ke tahun nilai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau senantiasa mengalami peningkatan secara Adapun nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah daerah sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 2,95 Triliun. Sedangkan nilai Standar Deviasi yang didapatkan adalah 0,63 yang menyatakan nilainya lebih rendah dari rata-rata. Maka hal ini membuktikan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah dari setiap tahunnya tidak memiliki selisih yang jauh satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Nilai Pendapatan Asli Daerah (X2) menunjukkan angka -0,990 sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka akan mempengaruhi penurunan pada efisiensi belanja daerah sebesar 0,990 satuan. Selain itu pada nilai

analisis hipotesis nilai signifikan t pada Pendapatan Asli Daerah adalah 0,007. Maka menunjukkan nilai perbandingan t hitung dan t tabel adalah $0,007 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga hasil uji parsial pada Pendapatan Asli Daerah mendapatkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Efisiensi Belanja Daerah

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Riau 2010-2019

Dari hasil analisis deskriptif di atas dapat diketahui bahwa nilai Desentralisasi Fiskal di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling rendah adalah 23,92% yang terjadi pada tahun 2014. Sedangkan nilai Desentralisasi Fiskal di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah 42,28% yang terjadi pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa dari tahun ke tahun nilai Desentralisasi Fiskal Provinsi Riau senantiasa mengalami peningkatan. Selain nilai Desentralisasi Fiskal, pada tahun 2018 juga nilai tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan tahun 2018 adalah tahun dimana Provinsi Riau memiliki pencapaian keuangan yang baik. Adapun nilai rata-rata Desentralisasi Fiskal sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 31,05%. Sedangkan nilai Standar Deviasi yang didapatkan adalah 6,8 yang menyatakan nilainya lebih rendah dari rata-rata. Maka hal ini membuktikan bahwa nilai Desentralisasi Fiskal dari setiap tahunnya tidak memiliki selisih yang jauh satu sama lainnya.

Hasil analisis regresi pada Nilai Desentralisasi Fiskal (X_3) menunjukkan angka 0,420. sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perubahan peningkatan kurs maka akan mempengaruhi peningkatan pada efisiensi belanja daerah sebesar 0.420 satuan. Hasil analisis hipotesis parsial menunjukkan nilai signifikan t pada Desentralisasi Fiskal adalah 0,041. Maka nilai perbandingan t hitung dan t tabel adalah $0,041 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga hasil uji parsial pada Desentralisasi Fiskal mendapatkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Belanja Daerah.

Pengaruh Transaksi Non Tunai, Pendapatan Asli Daerah, dan Desentralisasi terhadap Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Riau 2010-2019.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling rendah adalah 67,75% yang terjadi pada tahun 2015. Sedangkan efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah 92,24% yang terjadi pada tahun 2019. Adapun nilai rata-rata efisiensi belanja daerah sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 82,8020. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Riau memiliki nilai efisiensi belanja daerah yang cukup baik dan ideal. Hal ini dibuktikan nilai efisiensi belanja daerah yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sedangkan nilai Standar Deviasi yang didapatkan adalah 8,117 yang menyatakan nilainya lebih rendah

dari rata-rata. Maka hal ini membuktikan bahwa nilai efisiensi belanja daerah memiliki jarak yang tidak terlalu tinggi.

Nilai konstanta adalah 139,665 menyatakan bahwa nilai pengaruh yang diberikan variabel independen kepada variabel dependen adalah pengaruh yang negatif. Maknanya, jika semua variabel bebas yakni Transaksi Non Tunai(X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Desentralisasi Fiskal (X3) memiliki nilai 0, maka nilai Efisiensi Belanja Daerah adalah 139,665 satuan.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0.008. Maka disimpulkan jika $0.008 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini membuktikan bahwa Transaksi Non Tunai (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Desentralisasi Fiskal (X3) secara simultan memberikan pengaruh Efisiensi Belanja Daerah.

Berdasarkan nilai koefisien Beta, dapat diketahui bahwa variabel Transaksi Non Tunai dengan nilai -1.166 adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah

SIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan, disimpulkan transaksi non tunai dan PAD memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau tahun 2010-2019. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau tahun 2010-2019. Variabel transaksi non tunai adalah

variabel yang paling berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.

Agar pemerintah Provinsi Riau dapat memperhatikan dan mengendalikan nilai transaksi non tunai, pendapatan asli daerah, dan desentralisasi fiskal karena memberikan pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah. Peneliti selanjutnya dapat memperhatikan variabel lainnya dalam mengukur pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adi, H. P. (2013). *Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar. (2015). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Erlina. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghazali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan*

- Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khusaini, M. (2016). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE.
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, A. R. (2011). *Ekonomi Fiskal*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mantel. (2010). *Project Management, A Managerial Approach*. India: John Wiley.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muluk, M. khairul. (2015). *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Malang: PT. Bayu Media.
- Partatiredja, A. (2010). *Perhitungan Pendapatan Nasional*. Jakarta: PT Sumber Daya.
- Rahman, H. (2011) *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Ritongga, & Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shidarta, Rasyid, A., & Sofian, A. (2018). *Aspek Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Simanjuntak, R. (2012). *Implikasi Fiskal Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Sumber Daya.
- Soemarsono, S. (2013). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trianto, B. (2015). *Riset Modeling*. Jakarta: Adh-Dhuha Institute.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Indonesia. (2006). *Peraturan menteri Dalam Negri No. 13 Tahun 2006.*

Peraturan Pemerintah Tahun 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., (2010).

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang*

Website

Bank Indonesia. 2004. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 *Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.*

Bank Indonesia. 2013. *Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia.*
<http://www.bi.go.id>. Diakses tanggal 10 September 2020.

Bank Indonesia. 2019. Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2007 *Tentang Perkembangan Sistem Pembayaran. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan.*

Bank Indonesia. 2019. Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 *Tentang Kelancaran Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang. Pusat pendidikan dan Studi Kebanksentralan.*

Bank Indonesia. 2019. *Statistik Sistem Pembayaran-Alat Pembayaran Menggunakan*

Kartu. <http://www.bi.go.id>. Diakses tanggal 10 September 2020.

DPKD Sumater Barat, Realisasi Belanja Pemerintah Sumater Barat *Membaik*
<https://dpkd.sumbarprov.go.id/berita/read/772-realisasi-belanja-pemerintah-daerah-sumbar-membaik.html>

Jurnal :

Handayani, T. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Nasabah Open Account Produk Tabungan Simpanan Pelajar Ib Di Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo (Studi pada SDN Keboan Sikep II Gedangan). *Jurnal Masalah, II.*

Lestari, B. A., Suharjo, B., & Muflikhati, I. (2016). *Minat Kepemilikan Kartu Kredit (Studi Kasus Kota Bogor).* 3(1), 143–151.
<https://doi.org/10.17358/JABM.3.1.143>

Manullang, Y. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Brizzi Bank Rakyat Indonesia di Kota Pekanbaru. *Faculty Of Economic And Bussines Riau University, Pekanbaru , Indonesia, 1,* 1–15.

Prabangsari, A. P. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

- Laporan Keuangan Dengan Standar Akuntansi Berbasis Akrua! Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Rogram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 3(2), 139–157. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2010v5n1.2536>
- Pramono, B. (2016). *Working paper: dampak pembayaran non tunai terhadap perekonomian dan kebijakan moneter.*
- Ramdani, L. (2016). Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. . . *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan. Volume 8 (1).*
- Sasongko, R., Burhanuddin, B., & Widayanti, R. (2019). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pada PT Bank Mandiri Persero Tbk (2015-2018). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 269–276. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i0.2.585>
- Sayoga, P., & Tan, S. (2017). *Analisis Cadangan Devisa Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi*. 12(1), 25–30.
- Selly Septiani dan Endah Kusumastuti, 2017, *Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Politeknik Negeri Bandung, Bandung
- Sugiyanta, 2016, *Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 14 No. 1 Juni 2016
- Susilo, A. T. (2011). *Pengaruh, Inflasi, Kurs, dan Suku Bunga SBI Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Syaifullajh, M., & Listya. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kecamatan Pontianak Kota Terhadap Penggunaan Kartu Debit Sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai. *Jurnal Al-Maslahat IAIN Pontianak*, 2, 197–218.
- Vella Kurniasih Fitr, 2017, *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2009-2012*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau

- Vira Maulina dan Irwan Taufiq Ritonga, 2016, *Analisis Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang)*, Jurnal Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- Wildan Dwi Dermawan, 2017, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Ilmiah EDUKASI Volume. 5 Nomor 2, November 2017
- Yuni Wijayanti, 2017, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Takasenseran, M. P. (2016). Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. *Lex et Societatis*, IV(7), 41–48.